

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman

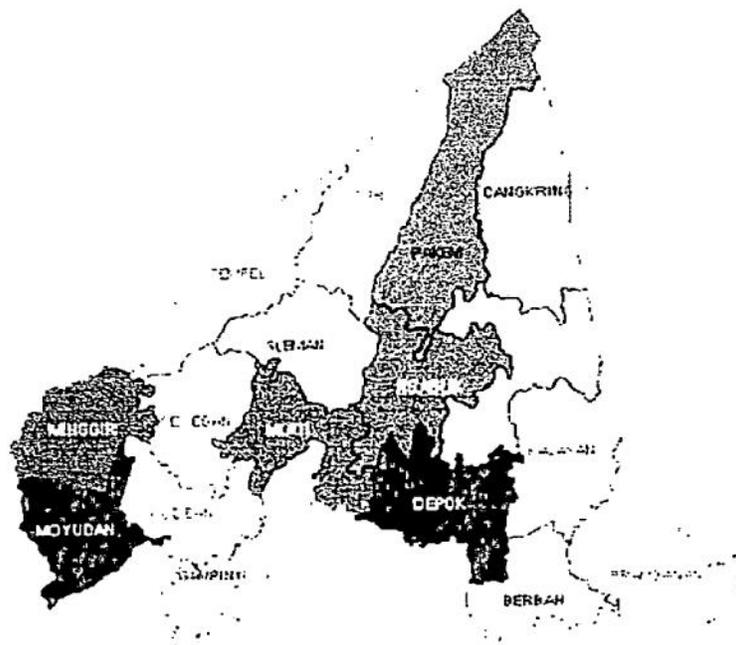
1. Kondisi Geografis Kabupaten Sleman

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Berikut ini merupakan batas dari wilayah Kabupaten Sleman:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah,
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah,
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta.

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km² atau sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 3.185,80 Km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km, Timur – Barat 35 Km. Luas lahan menurut penggunaan pada tahun 2011 terjadi pergeseran yang cukup besar dibandingkan tahun 2010. Hal ini terjadi karena efek lanjutan dari bencana Merapi 2010. Lahan untuk Tegal turun 259,21 ha sedangkan lahan Tanah Tandus dan semak naik 334,71 ha.

Gambar 2
Peta Kabupaten Sleman



Sumber : <http://kecamatan.slemankab.go.id>

Kabupaten Sleman merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan perda No. 12 tahun 1998, hari jadi Kabupaten Sleman disepakati tanggal 15 Mei 1916, sehingga pada tahun 2012 merupakan peringatan hari jadi yang ke-96.

Visi pembangunan Kabupaten Sleman 2011-2015 yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT SLEMAN YANG LEBIH SEJAHTERA LAHIR BATHIN, BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN GENDER PADA TAHUN 2015". Adapun Misinya adalah

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat,
- c. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan,
- d. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- e. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.

Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri atas 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. Berikut rincian dapat dilihat dalam tabel :

Tabel 1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km ²)
		Desa	Dusun			
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1.216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2.133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1.267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2.249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1.583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1.774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1.712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2.351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1.428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1.64
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1.524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1.75
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1.243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3.069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	549
Jumlah		86	1192	57.482	850.176	2029.939

Sumber : www.slemankab.go.id

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya.
- b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
- c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan

Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

- a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta.

2. Topografi Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan

sebagian di Kecamatan Gamping. Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian < 100 m, $100 - 499$ m, $500 - 999$ m dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian $> 100 - 499$ m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian $> 500 - 999$ m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 % dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan.

Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan Nopember – April dan musim kemarau antara bulan Mei – Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya hari hujan 25 hari terjadi pada bulan maret, namun demikian rata-rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan februari sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari.

Adapun kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan Agustus sebesar 74 % dan tertinggi pada bulan Maret dan Nopember masing-masing sebesar 87 %, sedangkan suhu udara terendah sebesar 26,1 derajat celcius pada bulan Januari dan Nopember dan suhu udara yang tertinggi 27,4 derajat celcius pada bulan September.

3. Demografi Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Sleman Tahun 2011 sebesar 1.107.304 jiwa, terdiri dari 554.636 laki-laki dan 552.668 perempuan. Dengan luas wilayah 574,82 km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Sleman adalah 1.926 jiwa per km². Beberapa kecamatan yang relatif padat penduduknya adalah Depok dengan 5.172 jiwa per km², Mlati dengan 3.588 jiwa per km² serta Gamping dan Ngaglik dengan masing-masing 3.353 jiwa dan 2.679 jiwa per km².

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam mengembangkan sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa banyak ditentukan oleh kualitas pendidikan penduduknya. Beberapa faktor utama yang mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana prasarannya, pengajar dan keterlibatan anak didik, keluarga maupun Komite Sekolah.

Pada jenjang SD, Kabupaten Sleman pada tahun 2011/2012 memiliki sebanyak 501 unit sekolah yang terdiri dari 379 SD negeri dan 122 SD swasta

dengan jumlah kelas masing-masing sebanyak 2.560 kelas untuk SD Negeri dan 928 kelas untuk SD swasta.

Banyaknya guru SD mencapai 4.432 orang di SD negeri dan 1.632 orang di SD swasta. Adapun peserta didik yang sedang mengenyam pendidikan tercatat sebanyak 87.465 anak yang terbagi menjadi 65.307 anak bersekolah di SD negeri dan 22.158 anak di SD swasta.

Pada jenjang SMP, jumlah sekolah tercatat sebanyak 106 sekolah, yang terdiri 54 SMP negeri dan 52 SMP swasta dengan menyediakan kelas masing-masing sebanyak 684 kelas untuk SMP negeri dan 350 kelas untuk SMP swasta.

Banyaknya guru yang mengajar di SMP tercatat sebanyak 2.718 orang. Sebagian besar dari mereka 1.690 orang mengajar di SMP negeri sedangkan selebihnya di SMP swasta.

Adapun murid yang bersekolah di SMP pada tahun 2011/2012 mencapai 33.098 orang yang terdiri dari 22.460 orang di SMP negeri dan SMP swasta sebanyak 9.638 orang.

Untuk jenjang yang lebih tinggi yakni SMU, tersedia sebanyak 45 sekolah dengan 17 SMA negeri dan 33 SMA swasta. Dengan mengamati banyaknya institusi, terlihat bahwa peran swasta di Kabupaten Sleman dalam penyelenggaraan SMA lebih sadar dibanding peran pemerintah. Tetapi jika dilihat dari banyaknya kelas, terjadi hal yang sebaliknya. SMU swasta memiliki 166 kelas, sedangkan SMU negeri memiliki 240 kelas.

Banyaknya guru di SMU negeri 687 orang dan banyaknya guru di SMU swasta 596 orang, dengan murid di SMU negeri sebanyak 7.736 orang dan di SMU swasta sebanyak 3.451 orang. Dengan membandingkan jumlah murid dan guru di SMA negeri dan swasta, secara jelas terlihat bahwa rasio murid terhadap guru di SMA swasta lebih kecil dibandingkan dengan SMA negeri. Kondisi ini bisa jadi disebabkan oleh tingginya minat peserta didik memilih SMA negeri, yang umumnya mengenakan biaya lebih rendah.

Untuk jenjang pendidikan menengah lainnya yakni SMK, terdapat sebanyak 53 sekolah yang didominasi oleh SMK swasta yakni sebanyak 45 sekolah. Banyaknya guru swasta yang terlibat juga lebih besar, yaitu 1.323 orang dibandingkan dengan SMK negeri sebanyak 602 orang guru yang mengajar.

5. Pemerintahan Kabupaten Sleman

Jumlah pegawai instansi otonomi pada tahun 2011 sebanyak 13.098 orang yang terdiri dari 5.871 pegawai laki-laki dan 7.227 pegawai perempuan. Dari jumlah tersebut, 221 orang adalah pegawai Golongan I, 2.830 orang golongan II, 4.364 orang pegawai golongan III, dan 5.683 orang adalah pegawai golongan IV. Menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan pegawai otonomi terdiri dari 137 pegawai berijazah SD, 304 berijazah SMP, 3.318 pegawai berijazah SMA, 3.892 pegawai berijazah DI-DIII, dan 5.447 pegawai berijazah DIV-S2.

Jumlah pegawai instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sleman adalah sebanyak 1.635 orang terdiri dari 10 orang pegawai golongan I, 210 pegawai

golongan II, 953 pegawai golongan III, dan 462 pegawai golongan IV. Bila dilihat dari pendidikannya, pegawai instansi vertikal tersebut terdiri dari 4 pegawai berijazah SD, 20 pegawai berijazah SMP, 315 pegawai berijazah SMA, 119 pegawai berijazah DI-DIII, dan 1.173 berijazah DIV-S2.

B. Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah (JPPD) Kabupaten Sleman

1. Latar Belakang

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Karena perkembangan dan kemajuan suatu bangsa dapat diukur melalui tingkat dan kualitas pendidikan serta tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan dan orang miskin memang tidak ada biaya untuk pendidikan dikarenakan lebih mengutamakan biaya untuk makan.

Perintah UUD 1945 ini diperkuat oleh UU Sistem Pendidikan Nasional (SPN) yang disahkan 11 Juni 2003. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan. Kaya maupun miskin. Namun, dalam realitasnya, sampai saat ini dunia pendidikan kita juga masih dihadapkan pada tantangan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Tantangan utama yang dihadapi di bidang pendidikan pada tahun 2008 adalah meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan,

terutama pada jenjang pendidikan dasar. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu", dan pasal 11, ayat (1) menyatakan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi".

Masalah pendidikan untuk rakyat miskin muncul dikarenakan berbagai faktor seperti, kecenderungan meningkatnya biaya pendidikan, pembiayaannya ditanggung sendiri dalam sistem tunai. Menurut data Susenas 2003, masih tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu lebih banyak bersumber pada persoalan ekonomi, karena banyak di antara anak-anak usia sekolah dasar itu berasal dari keluarga miskin. Kenaikan biaya pendidikan semakin sulit diatasi oleh kemampuan penyediaan dana pemerintah maupun masyarakat. Peningkatan biaya itu mengancam akses dan mutu pelayanan pendidikan dan karenanya harus dicari solusi untuk mengatasi masalah pembiayaan pendidikan ini

Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, adalah melalui pemberian jaminan pembiayaan pendidikan, serta untuk mewujudkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemberian jaminan pembiayaan pendidikan daerah perlu adanya pedoman dalam pemberian jaminan pembiayaan pendidikan. Untuk itu Bupati Sleman mengeluarkan peraturan melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 tahun 2009 Tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik SMA dan SMK.

2. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan pemberian jaminan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin melalui pemberian kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang SMA dan SMK. Jaminan pembiayaan pendidikan dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, meliputi:

- a. kegiatan belajar mengajar;
- b. kegiatan kesiswaan;
- c. gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap;
- d. pengelolaan administrasi sekolah;
- e. kegiatan peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. langganan daya dan jasa; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah

Jaminan pembiayaan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Sleman ditujukan kepada peserta didik SMA dan SMK untuk keluarga miskin yang bersekolah di Kabupaten Sleman pada jenjang SMA dan SMK negeri, SMA dan SMK swasta. Berikut adalah tabel daftar SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta yang berada di Kabupaten Sleman:

Tabel 2
Daftar SMA Negeri dan Swasta di Kabupaten Sleman

NEGERI	SWASTA
SMA N 1 Cangkringan	SMA Institut Indonesia Berbah
SMA N 1 Depok	SMA Sunan Kalijogo Sleman
SMA N 1 Gamping	SMA Kolese De Brito Depok
SMA N 1 Godean	SMA Kolombo Depok
SMA N 1 Kalasan	SMA Mandala Bhakti Depok
SMA N 1 Minggir	SMA Angkasa Adisucipto Depok
SMA N 1 Mlati	SMA Muh 2 Depok
SMA N 1 Ngaglik	SMA GAMA Yogyakarta
SMA N 2 Ngaglik	SMA Muh Gamping
SMA N 1 Ngemplak	SMA Islam I Sleman
SMA N 1 Pakem	SMA Proklamasi 1945
SMA N 1 Prambanan	SMA Imanuel Kalasan
SMA N 1 Sayegan	SMA Muh Kalasan
SMA N 1 Sleman	SMA Muh Minggir
SMA N 2 Sleman	SMA Budi Mulia Minggir
SMA N 1 Tempel	SMA Bina Tama Sleman
SMA N 1 Turi	SMA Dr Wahidin Mlati
	SMA Muh Mlati
	SMA Santo Mikael Mlati
	SMA Islam 2 Moyudan
	SMA Bina Harapan Ngaglik
	SMA IKIP Veteran Ngemplak
	SMA Muh Pakem
	SMA Islam 3 Sleman
	SMA Darul Hikmah Pakem
	SMA Islam 1 Prambanan
	SMA Muh 1 Prambanan
	SMA Muh 2 Prambanan
	SMA Muh Seyegan
	SMA Sulaiman Sleman
	SMA Muh 1 Sleman
	SMA Santo Agustinus Sleman
	SMA Ma'arif 1 Sleman

Tabel 3
Daftar SMK Negeri dan Swasta di Kabupaten Sleman

NEGERI	SWASTA
SMK NEGERI 1 CANGKRINGAN	SMK YAPEMDA 1 SLEMAN
SMK NEGERI 1 DEPOK	SMK MUHAMMADIYAH BERBAH
SMK NEGERI 2 DEPOK	SMK NASIONAL BERBAH
SMK NEGERI 1 GODEAN	SMK MUHAMMADIYAH CANGKRINGAN
SMK NEGERI 2 GODEAN	SMK YPKK 3 SLEMAN
SMK NEGERI 1 KALASAN	SMK KARYA RINI
SMK NEGERI 1 SEYEGAN	SMK PENERBANGAN AAG ADISUTJIPTO
SMK NEGERI 1 TEMPEL	SMK DIPONEGORO DEPOK
	SMK PI AMBARUKMO 1 DEPOK
	SMK TRISULA 1 DEPOK
	SMK YPKK 1 SLEMAN
	SMK MUHAMMADIYAH GAMPING
	SMK PUTRA SAMODERA YOGYAKARTA
	SMK TARAKANITA
	SMK MUDA PATRIA KALASAN
	MUHAMMADIYAH 1 KALASAN
	SMK MUHAMMADIYAH MINGGIR
	SMK MUHAMMADIYAH MLATI
	SMK MUHAMMADIYAH 1 MOYUDAN
	SMK MUHAMMADIYAH 2 MOYUDAN
	SMK ISLAM MOYUDAN
	SMK PIRI SLEMAN
	SMK YPPN SLEMAN
	SMK BINA HARAPAN SINDUHARJO
	SMK SANJAYA PAKEM
	SMK KANISIUS 1 PAKEM
	SMK HAMONG PUTERA 1 PAKEM
	SMK HAMONG PUTERA 2 PAKEM
	SMK MUHAMMADIYAH PAKEM
	SMK MUHAMMADIYAH PRAMBANAN
	SMK SOSIAL ISLAM PRAMBANAN
	SMK 17 SEYEGAN
	SMK MA'ARIF 1 SLEMAN
	SMK MUHAMMADIYAH SEYEGAN
	SMK SULAIMAN
	SMK YPKK 2 SLEMAN
	SMK MUHAMMADIYAH 1 SLEMAN
	SMK MUHAMMADIYAH 2 SLEMAN
	SMK MA'ARIF 2 SLEMAN
	SMK MUHAMMADIYAH 1 TEMPEL
	SMK MUHAMMADIYAH 2 TEMPEL
	SMK PEMBAHARUAN INDONESIA SLEMAN
	SMK INSAN CENDEKIA
	SMK MUHAMMADIYAH 1 TURI
	SMK MUHAMMADIYAH 2 TURI

Sumber: www.disdik sleman.org

3. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 tahun 2009 Tentang Jaminan Pembiayaan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik SMA dan SMK adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;